Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Stabat

Firdaus Syafaat

Universitas Medan Area

Email: firdaus_syafaat@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara dalam Gugatan Sederhana berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan bagaimana penerapan gugatan sederhana (*small claim court*) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Stabat. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan penyelesaian perkara gugatan sederhana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Stabat terlaksana secara efektif dan merupakan wujud nyata dari pelaksanaan penyelenggaraan peradilan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci: Gugatan sederhana; perkara hukum; Pengadilan Negeri Stabat.

PENDAHULUAN

Perkembangan yang terjadi di dalam pembaharuan hukum diakibatkan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perdagangan dan bisnis. Selain diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan juga patut didukung oleh perangkat dan penegakan hukum yang tidak menghambat perdagangan serta bisnis. Sehingga dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang dianggap sebagai penyebab kerugian. Maka dalam hal ini hukum berperan melindungi kepentingan dari berbagai pihak, sehingga tidak terjadi pihak yang satu dirugikan dan pihak yang lain diuntungkan (Sastrawidjaja, 2006, p. 71). Dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata, di mana hubungan hukum itu terjadi antara subyek hukum yang satu dengan yang lain (Muhamad, 1990, p. 16).

Menurut Maxwell J. Fulton dalam Abdul R. Saliman, sengketa bisnis adalah: "*a commercial disputes is one which arises during the course of the exchange of transaction procces is central to market economy*" (suatu sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar) (Saliman, 2005, p. 280). Sengketa ini muncul selain diakibatkan oleh ketimpangan juga dapat disebabkan karena salah satu pihak tidak benar-benar menaati dan melaksanakan isi perjanjian. Sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain, kerugian tersebut baik bersifat kerugian nyata (*realiance loss*) maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan dari dipenuhinya suatu perjanjian (*expectation loss*) yang secara garis besar disebut dengan cedera janji (wanprestasi) (Asnawi, 2016, p. 702).

Korelasi positif jumlah transaksi terhadap jumlah frekuensi sengketanya, artinya semakin banyak transaksi bisnis yang terjadi, maka semakin sering pula terjadi sengketa. Implikasinya, banyak kasus-kasus sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (Fitrotin, 2014, p. 3). Semakin cepat, efektif, dan efisien suatu penyelesaian sengketa semakin

baik keadaannya untuk kedua belah pihak. Cara untuk menyelesaikan sengketa bisnis dapat dilakukan melalui dua bentuk penyelesaian. Pertama dengan menggunakan litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan, pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution* (Amriani, 2012, p. 35). Kedua, penyelesaian sengketa menggunakan sarana non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni dengan cara-cara mediasi atau perdamaian (Achmad, 2015, p. 338).

Lamanya proses acara persidangan hingga diperoleh putusan tidak sebanding dengan nilai gugatan yang dituntut bagi pihak pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan tetapi dengan nilai gugatan yang kecil. Pada akhirnya, lembaga peradilan yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien (Suparman, 2012, p. 2). Namun demikian penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang bersifat formal akan menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum. Banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa menyebabkan penumpukan perkara di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, apalagi di peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung).

Guna menghadapi dan menyelesaikan permasalahan di atas, maka terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk masyarakat pencari keadilan yaitu pada tanggal 7 Agustus 2015 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Kemudian, pada tahun 2019 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung terbaru yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan. Mekanisme dengan *small claim court* merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan acara cepat dan sederhana sehingga biaya dapat lebih ringan, dengan menggunakan prosedur beracara di luar prosedur dalam menangani perkara perdata biasa, yang diperuntukan bagi perkara perdata dengan nilai gugatan kecil. Melalui mekanisme *small claim court*, penyelesaian sengketa perdata (bisnis) diharapkan dapat memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Tetapi pada kenyataannya sistem gugatan sederhana belumlah menjadi pilihan masyarakat pencari keadilan, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu atau masih awam tentang gugatan sederhana sehingga mereka tetap memilih menggunakan jalur litigasi konvensional. Hal ini menjadi sebuah hal yang patut diteliti.

METODE DAN FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif, di mana metode normatif merupakan penelitian hukum yang berdasarkan pada doktriner sehingga penelitian ini disebut juga penelitian perpustakaan. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang melihat hukum secara riil dan bagaimana penerapan serta respon masyarakat terhadapnya. penelitian ini lebih pada melihat hukum secara *Ius constitutum dan Ius constituendum* (Fakhriah, 2013). Pendekatan yang digunakan, diantaranya pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosio legal (pendekatan sosiologis), pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji penerapan hukum dalam pelaksanaan gugatan sederhana yang meliputi masyarakat baik perorangan maupun yang

berbadan hukum yang mengajukan gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Stabat (Marzuki, 2005, pp. 93–137).

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah, data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang besumber dari peraturan perundang-undangan, data arsip dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dan observasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) (Soekanto, 2010, pp. 21–25).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Wanprestasi di Pengadilan Negeri Stabat

Sejak dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019, Pengadilan Negeri Stabat telah membuka dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur gugatan sederhana. Untuk tahun 2019 dan 2020, jumlah perkara gugatan sederhana yang diajukan di Pengadilan Negeri Stabat untuk tahun 2019 sebanyak 19 perkara dan untuk tahun 2020 sebanyak 5 perkara. Dari seluruh perkara tersebut semuanya merupakan gugatan sederhana klasifikasi wanprestasi (hutang piutang)

Berikut ini penulis sajikan dalam bentuk tabel jumlah keseluruhan perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Stabat untuk periode tahun 2019 dan 2020.

Tabel 1. Daftar Perkara Gugatan Sederhana Tahun 2019

No	No Perkara	Tanggal Register
1	1/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	11-03-2019
2	2/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	11-03-2019
3	3/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	11-03-2019
4	4/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	11-03-2019
5	5/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	13-03-2019
6	6/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	13-03-2019
7	7/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	13-03-2019
8	8/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	13-03-2019
9	9/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	13-03-2019
10	10/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	02-05-2019
11	11/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	02-05-2019
12	12/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	02-05-2019
13	13/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	02-05-2019
14	14/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	02-05-2019
15	15/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	22-07-2019
16	16/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	22-07-2019
17	17/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	22-07-2019
18	18/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	22-07-2019
19	19/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	30-08-2019

Tabel 2. Daftar Perkara Gugatan Sederhana Tahun 2020

No	No Perkara	Tanggal Register
1	1/Pdt.G.S/2020/PN Stb	13-03-2020
2	2/Pdt.G.S/2020/PN Stb	13-03-2020
3	3/Pdt.G.S/2020/PN Stb	13-03-2020
4	4/Pdt.G.S/2020/PN Stb	13-03-2020
5	5/Pdt.G.S/2020/PN Stb	13-03-2020

Tabel 3. Hasil Perkara/Putusan Gugatan Sederhana di PN Stabat Tahun 2019

No	No. Perkara	Para Pihak	Tgl. Register	Tgl. Putusan
1	1/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	Penggugat: PT. Bank XX, Tbk Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	11-03-2019	13-03-2019 (Dismissal)
2	2/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	11-03-2019	15-04-2019 (Kabul)
3	3/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	11-03-2019	11-04-2019 (Damai)
4	4/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	11-03-2019	15-04-2019 (Gugur)
5	5/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	13-03-2019	18-03-2019 (Dismissal)
6	6/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	13-03-2019	23-04-2019 (Damai)
7	7/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	13-03-2019	15-03-2019 (Dismissal)
8	8/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	13-03-2019	02-04-2019 (Damai)

9	9/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	13-03-2019	09-04-2019 (Damai)
10	10/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	02-05-2019	28-05-2019 (Damai)
11	11/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY 2.ZZ	02-05-2019	13-06-2019 (Kabul)
12	12/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	02-05-2019	29-05-2019 (Verstek, Kabul)
13	13/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	02-05-2019	28-05-2019 (Damai)
14	14/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	02-05-2019	25-06-2019 (Tidak Dapat Diterima)
15	15/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	22-07-2019	13-08-2019 (Damai)
16	16/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	22-07-2019	13-08-2019 (Cabut)
17	17/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	22-07-2019	06-09-2019 (Kabul)
18	18/Pdt.G.S/2019/PN.Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	22-07-2019	21-08-2019 (Damai)
19	19/Pdt.G.S/2019/PN Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	30-08-2019	30-09-2019 (Damai)

Tabel 4. Hasil Perkara/Putusan Gugatan Sederhana di PN Stabat Tahun 2020

1	1/Pdt.G.S/2020/PN Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	13-03-2020	04-05-2020 (Kabul)
2	2/Pdt.G.S/2020/PN Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	13-03-2020	04-06-2020 (Kabul)
3	3/Pdt.G.S/2020/PN Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	13-03-2020	09-04-2020 (Damai)
4	4/Pdt.G.S/2020/PN Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	13-03-2020	30-04-2020 (Kabul)
5	5/Pdt.G.S/2020/PN Stb	Penggugat: PT. Bank XX Cabang Stabat Tergugat: 1.YY dan 2.ZZ	13-03-2020	23-03-2020 (Gugur)

Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) untuk Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Stabat

Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019, Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pengecualian perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

1. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
2. sengketa hak atas tanah.

Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing - masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana, sehingga penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa di dampingi oleh kuasa hukum.¹ Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Tahapan penyelesaian perkara dalam Gugatan sederhana meliputi:

¹ Ketentuan Pasal 4 Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhan

1. Pendaftaran;
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
4. Pemeriksaan pendahuluan;
5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7. Pembuktian; dan
8. Putusan.

Hal yang diutamakan dalam PERMA ini adalah penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.² Tahap pemeriksaan, penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Penggugat dapat mendaftarkan gugatan dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

1. Identitas penggugat dan tergugat;
2. Penjelasan ringkas duduk perkara;
3. Tuntutan penggugat.

Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³

Tahap berikutnya adalah penyelesaian kelengkapan gugatan sederhana. Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana. Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kemudian, pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.⁴ Setelah itu, Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara. Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.⁵

Tahap selanjutnya adalah Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti. Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana.⁶ Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Keseluruhan proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari.⁷ Pada Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Terhadap penetapan yang dimaksud diatas, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.⁸ Jika Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama.⁹

² Ketentuan Pasal 5 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

³ Ketentuan Pasal 6 Perma no. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁴ Ketentuan Pasal 7 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁵ Ketentuan Pasal 8 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁶ Ketentuan Pasal 9 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁷ Ketentuan Pasal 10 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁸ Ketentuan Pasal 11 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁹ Ketentuan Pasal 12 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam pasal 13, dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutus perkara tersebut secara verstek. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan. Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang kedua tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat (4), tergugat dapat mengajukan keberatan.¹⁰ Menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
3. Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
4. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Peran aktif sebagaimana disebutkan diatas harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.¹¹

Selanjutnya pada hari sidang pertama Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Perma No. 4 Tahun 2019. Upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.¹² Jika perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat.¹³ Proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.¹⁴

Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan. Terhadap dalil gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku.¹⁵ Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan.¹⁶

Putusan dalam Gugatan Sederhana terdiri dari:

1. Kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
2. Identitas para pihak;

¹⁰ Ketentuan Pasal 13 Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

¹¹ Ketentuan Pasal 14 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

¹² Ketentuan Pasal 15 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

¹³ Ketentuan Pasal 16 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

¹⁴ Ketentuan Pasal 17 Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

¹⁵ Ketentuan Pasal 18 Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

¹⁶ Ketentuan Pasal 19 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

3. Uraian singkat mengenai duduk perkara;
4. Pertimbangan hukum; dan
5. Amar putusan.

Apabila para pihak tidak hadir, juru sita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Panitera pengganti mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera pengganti.¹⁷

Para pihak dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai alasan-alasannya.¹⁸ Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.¹⁹

Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan.²⁰ Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.²¹ Pada proses pemeriksaan keberatan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan.

Pemeriksaan Keberatan dilakukan atas dasar:

1. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
2. Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
3. Kontra memori keberatan.

Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2015 berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan keberatan. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan.²² Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.²³ Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap

¹⁷ Ketentuan Pasal 20 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

¹⁸ Ketentuan Pasal 21 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

¹⁹ Ketentuan Pasal 22 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

²⁰ Ketentuan Pasal 23 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

²¹ Ketentuan Pasal 24 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

²² Ketentuan Pasal 29 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

²³ Ketentuan Pasal 30 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

dilaksanakan secara sukarela. Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning. Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan aanmaning tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, ketua pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b). Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.²⁴

Efektifitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Stabat

Perkara gugatan sederhana yang disengketakan di Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 untuk tahun 2019 dan tahun 2020 Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2, jumlah gugatan sederhana klasifikasi wanprestasi sejumlah 24 perkara.

Untuk melihat efektivitas mengenai keberlakuan Perma No.2 Tahun 2015 dan Perma No.4 Tahun 2019 dapat dilihat atau dapat diukur dari beberapa aspek di antaranya:

Kriteria Jenis Perkara dalam Gugatan Sederhana

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Perma No.2 Tahun 2015 menyatakan bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/PMH dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan tersebut telah dirubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019, yang di dalam Pasal 3 ayat (1) Perma perubahan tersebut dikatakan bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau PMH dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta ribu rupiah). Dari ketentuan tersebut terdapat dua kriteria perkara gugatan sederhana yakni wanprestasi dan PMH. Sedangkan perkara gugatan sederhana yang diajukan di Pengadilan Negeri Stabat sebagaimana disajikan pada Tabel di atas, diperiksa dan diputus adalah gugatan sederhana wanprestasi (hutang – piutang). Dapat dikatakan bahwa perkara-perkara gugatan sederhana yang diajukan di Pengadilan Negeri Stabat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perma No.2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019.

Kriteria Jenis Perkara dalam Gugatan Sederhana

Penerapan Perma No. 2 dan Perma No. 4 Tahun 2019 dalam semua tahapan penyelesaian perkara gugatan sederhana wanprestasi (hutang – piutang) di Pengadilan Negeri Stabat dapat dilihat dari Tabel di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pada tahapan pemeriksaan pendahuluan terdapat 3 (perkara) perkara gugatan sederhana yang digugurkan (dismissal) oleh hakim, dikarenakan juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 yaitu:

1. Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Stb
2. Perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Stb
3. Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Stb

Putusan perdamaian jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan putusan yang lainnya yaitu dalam perkara:

1. Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Stb
2. Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Stb
3. Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Stb
4. Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN Stb

²⁴ Pasal 31 Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

5. Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Stb
6. Perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Stb
7. Perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Stb
8. Perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Stb
9. Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Stb
10. Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Stb

Kesepakatan perdamaian lahir dari kesadaran para pihak yang berperkara untuk berdamai demi keuntungan semua pihak dan secara proses hukum acara Penetapan Akta Perdamaian merupakan putusan final, berkekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak.

Batasan Waktu Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama. Dan apabila berlanjut sampai pada tahapan penyelesaian gugatan sederhana keputusan keberatan, harus selesai dalam waktu tidak melebihi dari 25 hari kerja sejak perkara gugatan sederhana didaftarkan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang menjadi dasar penyelesaian tercermin dari adanya pembatasan waktu berperkara. Pada penerapannya di Pengadilan Negeri Stabat terdapat perkara gugatan sederhana wanprestasi yang melebihi dari 25 hari kerja yaitu dalam:

1. Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Stb
2. Perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Stb
3. Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Stb
4. Perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Stb
5. Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Stb

KESIMPULAN

Penyelesaian gugatan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan salah satu solusi dalam mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan merupakan wujud nyata dari pelaksanaan penyelenggaraan peradilan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

1. Kiranya perlu sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang proses penyelesaian gugatan sederhana;
2. Kiranya perlu ketelitian yang lebih bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan persidangan sampai memberikan putusan karena selain disidangkan dengan hakim tunggal waktu penyelesaian perkara juga relative singkat yakni dibatasi maksimal 25 hari kerja.

REFERENSI

- Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus (Edisi Kelima), Jakarta: Kencana, 2005.
- Abdulkadir Muhamad, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. 4, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Kencana, 2015.
- Arto, A. Mukti. Mencari Keadilan Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- Fakhriah, EfaLaela, Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Jurnal Mimbar Hukum -repository.unpad.ac.id
- Harahap, Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Editor: Ade Hairul Rachman dan Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Jamilah, Fitrotin, SHI, MHI, Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Jakarta: Ull Pres, 2016.
- Nevey Varida Ariani. 2018. Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 18 Nomor 3, hlm 386.
- Nurnaningsih Amriani, Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Sastrawidjaja, Man, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Aneka Cara Pembedaan Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI-Press, 2010.
- Suparman. E., Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2012.
- PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.